

Katalog: 4102004.3308



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN MAGELANG
2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN MAGELANG**

2018

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG 2018

ISBN : 978-623-91219-6-9
Nomor Publikasi : 33080.1939
Katalog : 4102004.3308
Ukuran Buku : 18,2 X 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 66 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover:

Balkondes Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak:

TM Percetakan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang 2018 menyajikan data dan informasi tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang, perkembangannya antarwaktu, dan perbandingannya antardaerah tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan). Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Data BPS terutama bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat digunakan untuk bahan kajian, perencanaan dan evaluasi berbagai macam program pembangunan serta bermanfaat bagi para pengguna data.

Kota Mungkid, November 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG



Ir. Sri Wiyadi, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab 1. Kependudukan	2
Bab 2. Kesehatan dan Gizi	13
Bab 3. Pendidikan.....	21
Bab 4. Ketenagakerjaan	35
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi	43
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan	48
Bab 7. Kemiskinan	57
Bab 8. Perlindungan Sosial	63
Bab 9. Sosial Lainnya	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB 1. Kependudukan	
Tabel 1.1 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang, 2018	5
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2018 (Jiwa/Km ²)	6
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Magelang 2012-2018	9
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Wanita Umur 10+ Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2012-2018 (%)	10
BAB 2. Kesehatan dan Gizi	
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2016-2018	19
BAB 3. Pendidikan	
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018	23
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2016-2018	26
Tabel 3.3 APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2015-2018	30
Tabel 3.4 APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2015-2018	31

BAB 4. Ketenagakerjaan

Tabel 4.1	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018.....	36
Tabel 4.2	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2018.....	41

BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi

Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2016-2018	44
Tabel 5.2	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per kapita Perhari di Kabupaten Magelang, 2016-2018	47

<https://magelangkab.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Indikator-Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2018	1
 BAB 1. Kependudukan	
Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang, 2012 - 2018	2
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2018.....	3
Gambar 1.3 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Magelang 2012-2018	8
Gambar 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2017-2018	12
 BAB 2. Kesehatan dan Gizi	
Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang, 2015-2018.....	14
Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2014-2018 (Tahun).....	15
Gambar 2.3 Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Magelang, 2018	16
Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016 – 2018 (%)	17
Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018.....	18

BAB 3. Pendidikan

Gambar 3.1	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2016-2018 (%).....	22
Gambar 3.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2014-2018.....	25
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang.....	27
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2018.....	29
Gambar 3.5	Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2014/2015-2018/2019.....	33
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2016-2018.....	34

BAB 4. Ketenagakerjaan

Gambar 4.1	Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2013-2018.....	38
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2018.....	39
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2018.....	42

BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi

Gambar 5.1	Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2018.....	45
------------	---	----

BAB 6. Perumahan dan Lingkungan

Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2018	49
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018 (%)	50
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2018	51
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2018.....	52
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2015-2018	52
Gambar 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Magelang, 2018.....	53
Gambar 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2018.....	55

BAB 7. Kemiskinan

Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2014-2018.....	59
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2014-2018.....	61

BAB 8. Perlindungan Sosial

Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2018.....	63
------------	---	----



BAB 9. Sosial Lainnya

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler, dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2014-2018.....

<https://magelangkab.bps.go.id>



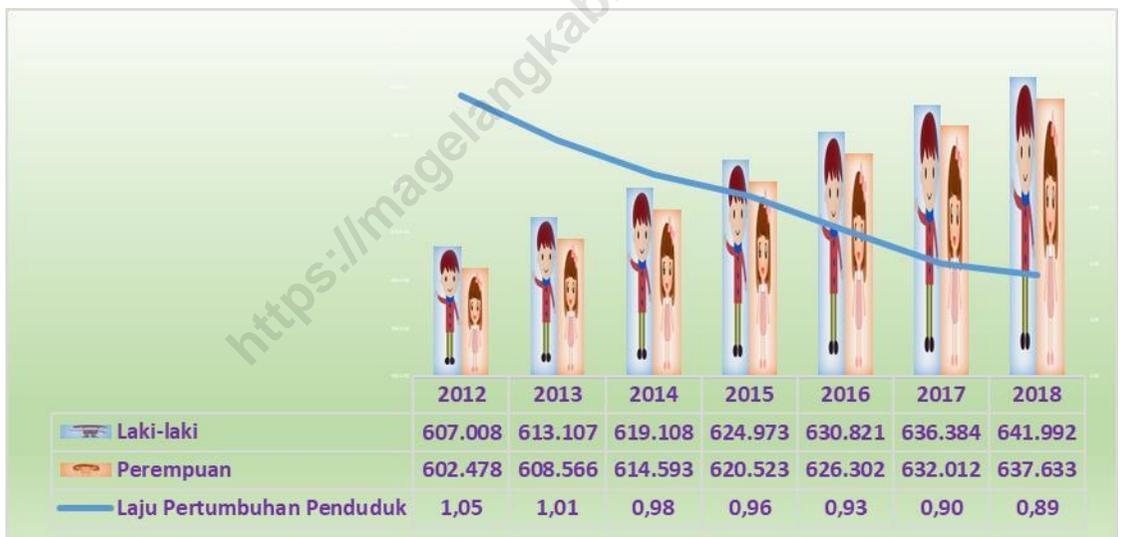
INDIKATOR-INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018



BAB I KEPENDUDUKAN

1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Data kependudukan merupakan masalah penting dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Selain itu, data kependudukan juga dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

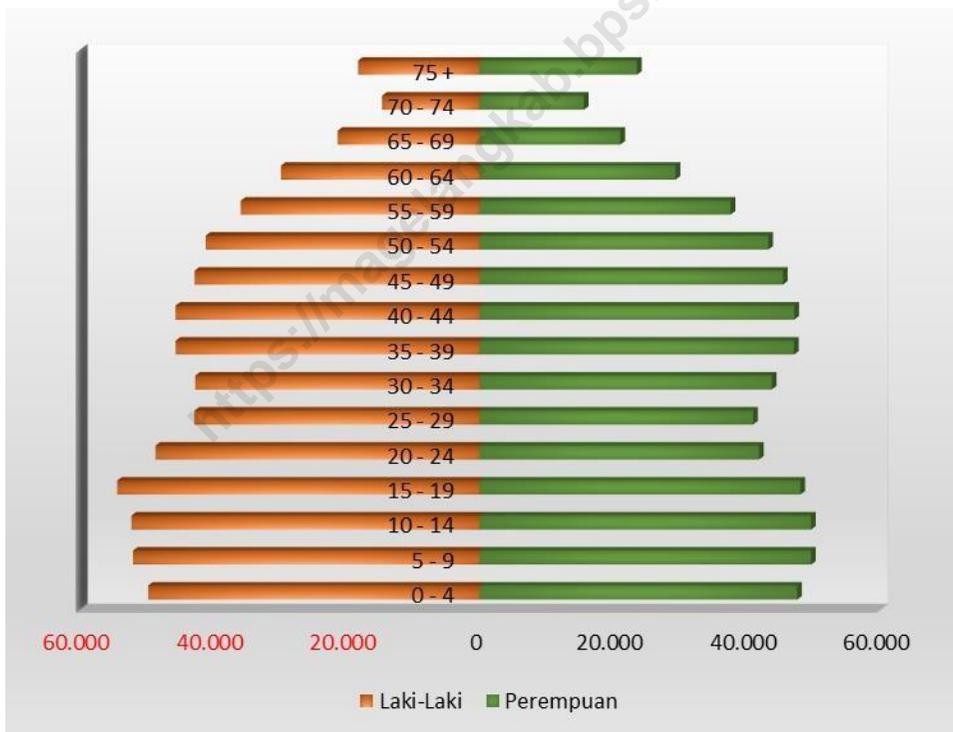


Sumber: BPS Kab. Magelang (Proyeksi Penduduk)

Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Magelang, 2012-2018

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada 2018 tercatat sebanyak 1.279.626 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir justru menunjukkan penurunan. Tercatat bahwa pada 2012, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang masih di atas 1 persen sedangkan pada 2018 lajunya semakin melambat, hingga mencapai 0,89 persen.

Pencapaian Kabupaten Magelang dalam hal pengendalian penduduk tersebut, tentunya layak untuk diapresiasi. Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk yang besar harus sejalan dengan pemenuhan segala kebutuhan hidup. Jika terjadi kendala terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan risiko meningkatnya jumlah kematian penduduk. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam teori kependudukannya, beliau berpendapat bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung.



Sumber: BPS Kab. Magelang

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2018

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang lebih besar daripada persentase penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada 2018 berjumlah 641.992 jiwa atau sebesar 50,17 persen dari total jumlah penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 637.633 jiwa atau sebesar 49,83 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Magelang berbentuk piramida expansive atau dikenal juga dengan piramida penduduk muda karena penduduk yang berusia muda lebih banyak. Piramida expansive berbentuk seperti limas, menunjukkan bahwa angka kelahiran cukup tinggi sedangkan angka kematiannya rendah. Bentuk piramida expansive Kabupaten Magelang sebagaimana umumnya terdapat pada negara-negara berkembang, seperti; India, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Ciri-Ciri Piramida Expansive penduduk suatu wilayah/negara sebagian besar berada pada kelompok penduduk berusia muda. Penduduk pada kelompok usia tua jumlahnya jauh lebih sedikit dari kelompok usia muda. Angka kelahiran bayi relatif tinggi sedangkan angka kematian rendah sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi.

Sex ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada waktu tertentu. *Sex Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin. Angka *sex ratio* dipengaruhi oleh angka kelahiran, migrasi, dan kematian berdasarkan jenis kelamin. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. (Pemprov Kalbar, 2013).

Pada tahun 2018 *sex ratio* Kabupaten Magelang 100,68, yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Kecamatan Tegalrejo memiliki *sex ratio* tertinggi, sebesar 108,63, sedangkan *sex ratio* terkecil berada di Kecamatan Ngluwar yaitu 97,28. Selain Kecamatan Ngluwar, beberapa kecamatan lain juga memiliki penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal itu ditandai dengan besaran *sex ratio* yang kurang dari 100. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Salaman, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Secang, dan Pakis.

Tabel.1.1 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang, 2018

Kecamatan	Rasio Ketergantungan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
01. Salaman	50.67	99.27
02. Borobudur	49.36	100.11
03. Ngluwar	51.85	97.28
04. Salam	50.27	99.43
05. Srumbung	49.98	99.28
06. Dukun	47.73	98.88
07. Muntilan	47.50	99.93
08. Mungkid	48.32	98.68
09. Sawangan	50.03	102.44
10. Candimulyo	52.48	101.22
11. Mertoyudan	44.34	98.24
12. Tempuran	48.58	102.49
13. Kajoran	52.18	101.67
14. Kaliangkrik	51.85	101.73
15. Bandongan	48.11	101.68
16. Windusari	52.06	104.04
17. Secang	48.74	99.95
18. Tegalrejo	44.66	108.63
19. Pakis	45.82	99.69
20. Grabag	50.22	101.30
21. Ngablak	41.85	101.33
Kabupaten Magelang	48.63	100.68

Sumber: BPS Kab. Magelang

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk hingga tingkat kecamatan disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2018 (Jiwa/km²)

Kecamatan	Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ² (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Salaman	71 090	68.87	1 032
02. Borobudur	59 476	54.55	1 090
03. Ngluwar	31 551	22.44	1 406
04. S a l a m	47 900	31.63	1 514
05. Srumbung	49 651	53.18	934
06. D u k u n	46 415	53.40	869
07. Muntilan	80 845	28.61	2 826
08. Mungkid	75 933	37.40	2 030
09. Sawangan	58 117	72.37	803
10. Candimulyo	49 292	46.95	1 050
11. Mertoyudan	117 128	45.35	2 583
12. Tempuran	50 273	49.04	1 025
13. Kajoran	53 476	83.41	641
14. Kaliangkrik	56 079	57.34	978
15. Bandongan	58 439	45.79	1 276
16. Windusari	50 890	61.65	825
17. Secang	83 637	47.34	1 767
18. Tegalrejo	58 535	35.89	1 631
19. Pakis	54 535	69.56	786
20. Grabag	87 148	77.16	1 129
21. Ngablak	39 056	43.80	892
Total	1 279 625	1 085.73	1 179

Sumber: BPS Kab. Magelang

Kepadatan penduduk suatu wilayah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan wilayah Kabupaten Magelang yang seluas 1.085,73 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.279.625 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Magelang pada 2018 adalah 1.179 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² wilayah Kabupaten Magelang dihuni oleh rata-rata 1.179 jiwa.

Dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana sosial,

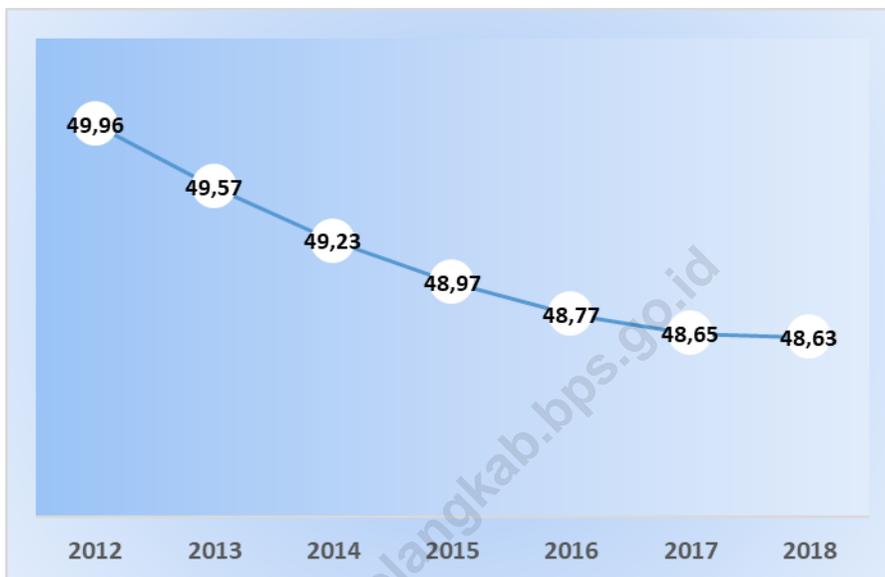
transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.2, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang pada 2018 adalah Kecamatan Muntilan, yaitu sebesar 2.826 jiwa per 1 km². Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 641 jiwa per 1 km². Beberapa kecamatan lain, seperti Srumbung, Dukun, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Pakis, dan Ngablak juga memiliki angka kepadatan penduduk di bawah 1000. Jika dicermati, beberapa kecamatan dengan angka kepadatan penduduk di bawah 1000 tersebut merupakan wilayah dengan topografi pegunungan.

Distribusi penduduk antarwilayah yang tidak merata, bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sumber: BPS Kab. Magelang

Gambar 1.3 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Magelang, 2012-2018

Rasio ketergantungan Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 48,63, yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 49 orang usia tidak produktif. Rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Candimulyo sebesar 52,48 sedangkan terendah di Kecamatan Ngablak sebesar 41,85.

Selama kurun waktu 2012 hingga 2018 Angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Magelang menunjukkan tren menurun. Hal ini merupakan suatu indikator positif, karena Angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Magelang 2012-2018

Tahun	Kelompok Umur			Angka Beban Ketergantungan	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	306,218	806,553	96,715	49.96	1,209,486
2013	305,230	816,808	99,635	49.57	1,221,673
2014	304,163	826,727	102,811	49.23	1,233,701
2015	303,099	836,057	106,340	48.97	1,245,496
2016	301,921	845,008	110,194	48.77	1,257,123
2017	300,709	853,304	114,383	48.65	1,268,396
2018	299,668	860,974	118,983	48.63	1,279,625

Sumber: BPS Kab. Magelang

Menurunnya angka beban ketergantungan di Kabupaten Magelang, diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Penurunan tersebut seharusnya dapat berdampak pada keuntungan ekonomis, karena potensi yang ada dapat dialihkan untuk memacu peningkatan kesejahteraan keluarga, tidak sekedar pemenuhan kebutuhan hidup semata.

Jika diamati lebih lanjut, terlihat pada Tabel 1.3 bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Magelang selama 2012-2018, lebih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Magelang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan prediksi bahwa bonus demografi di Indonesia akan terjadi pada tahun 2030, dimana usia produktif mencapai 64 persen. Menyambut era bonus demografi tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempersiapkan diri dalam ketersediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk usia produktif.

Untuk kelompok umur 65 tahun ke atas, mencapai 9,02 persen dari jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir hampir mencapai 3,47 persen. Meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Wanita Umur 10+ Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2012-2018 (%)

Tahun	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun)			
	<17	17-18	19-24	25+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	13,81	21,58	49,39	15,22
2013	17,94	23,94	44,94	13,18
2014	16,60	23,93	45,12	14,35
2015	4,95	19,85	64,72	10,48
2016	12,63	23,65	46,77	16,95
2017	13,11	21,97	51,05	13,87
2018	12,27	18,38	51,20	18,15

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun. Jika diperhatikan, pada Tabel 1.4 terlihat bahwa selama kurun waktu 6 tahun terakhir, sebagian besar wanita di Kabupaten Magelang melakukan perkawinan pertama di rentang usia 19-24 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas 2012-2018, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 tahun terlihat fluktuatif. Pada 2018, wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 tahun sebesar 12,27 persen, sedangkan wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di atas 17 tahun adalah 87,73 persen. Belum cukupnya kesiapan baik dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi membuat perkawinan pertama pada wanita di bawah 17 tahun sangat rentan terhadap risiko kematian dan kesehatan, selain juga memperbesar peluang jumlah penduduk yang dilahirkan. Oleh karena itu, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama di bawah 17 tahun perlu dikendalikan.

1.5 Penggunaan Alat/ Cara KB

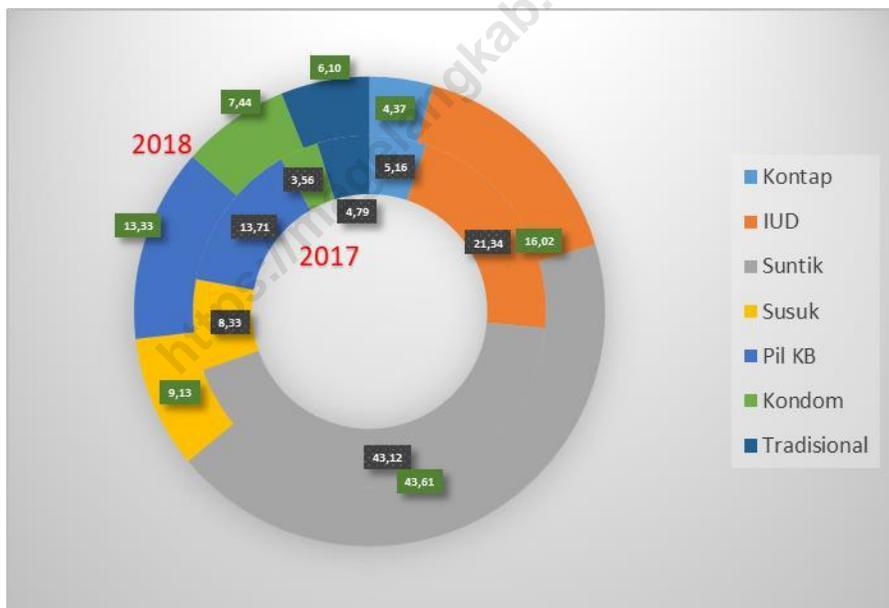
Secara umum, Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang guna menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Jika dijabarkan, program ini pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kelahiran atau menunda kehamilan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), serta menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Kontrasepsi didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi yang dapat direkomendasikan kepada Ibu yang ingin menunda kehamilan dan yang menjarangkan kehamilan adalah pil, IUD/spiral, implan/susuk, suntik atau alat kontrasepsi sederhana, misalnya kondom. Sementara itu, untuk yang tidak menginginkan hamil lagi, alat kontrasepsi yang paling direkomendasikan adalah kontrasepsi mantap yaitu dengan melakukan tubektomi (steril pada wanita) atau vasektomi (steril pada pria) selain semua metode yang lain.

Kontrasepsi ideal harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: dapat dipercaya, tidak menimbulkan efek yg mengganggu kesehatan, daya kerja dapat diatur sesuai kebutuhan, tidak menimbulkan gangguan ketika *koitus*, tidak memerlukan motivasi terus menerus, mudah pelaksanaannya, murah harganya dan dapat diterima penggunaanya oleh pasangan yang bersangkutan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kabupaten Magelang, namun yang paling banyak peminatnya selama dua tahun terakhir adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek (Susenas, 2017-2018). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, menunjukkan bahwa persentase penggunaan kontrasepsi KB metode suntikan di Kabupaten Magelang mencapai 43,61 persen, yang diikuti oleh IUD 16,02 persen dan pil 13,33 persen.

Sejalan dengan hasil Susenas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang juga mengungkapkan, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan metode suntikan.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2017-2018

BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor determinan munculnya masalah kesehatan, yaitu: **faktor perilaku/ gaya hidup** (*life style*), **faktor lingkungan** (sosial, ekonomi, politik, budaya), **faktor pelayanan kesehatan** (jenis cakupan dan kualitasnya) dan **faktor genetik** (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 1997).

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pencegahan, yang dapat dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Sementara itu, tiga faktor lain masih dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti: semakin memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat di kalangan masyarakat luas, serta memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan beberapa penyakit lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang 2016-2018

Berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2018 menunjukkan angka kesakitan penduduk perempuan di Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 0,75 point. Hal serupa juga terjadi di tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2016, angka kesakitan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan angka kesakitan laki-laki.

Semakin membaiknya derajat kesehatan di Kabupaten Magelang diikuti pula dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,22 poin, dari 73,25 pada 2014 menjadi 73,47 tahun pada 2018.



Sumber: BPS Kab. Magelang

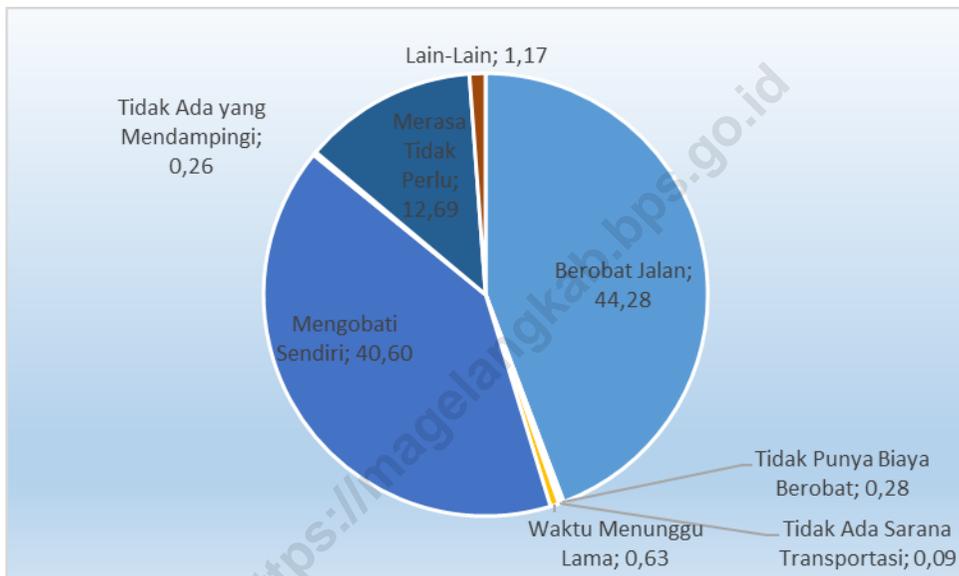
Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2014-2018 (Tahun)

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk, jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk (kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya) serta jenis pelayanan kesehatan.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan

data Susenas 2018, terdapat 44,28 persen penduduk Kabupaten Magelang yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, sedangkan sisanya, yaitu 55,72 persen penduduk memutuskan untuk tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat selain berobat jalan tersebut, misalnya dengan mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati.



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.3 Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Magelang, 2018

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Magelang, sebanyak 44,28 persen berobat jalan. Berobat jalan merupakan kegiatan atau upaya anggota ruta yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota ruta. Hal ini menunjukkan sudah ada kesadaran masyarakat untuk berobat. Sebanyak 40,60 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengobati sendiri keluhannya. Mengobati sendiri yang dimaksud adalah upaya anggota ruta yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra). Misalnya minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, minum jamu, kerokan, kompres, kop, dan sebagainya agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya. Sementara sisanya tidak melakukan berobat jalan

dikarenakan merasa tidak perlu, tidak mempunyai biaya, tidak ada sarana transportasi, waktu menunggu lama, maupun lainnya.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan yang berobat jalan lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan, selisih 1,49 poin. Data Susenas 2018 menunjukkan, terdapat 45,17 persen penduduk perkotaan yang berobat jalan, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 43,76 persen. Berbanding terbalik dengan data susenas tahun 2017 yang menunjukkan bahwa penduduk perdesaan lebih banyak yang berobat jalan dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Adanya perbedaan tersebut, perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

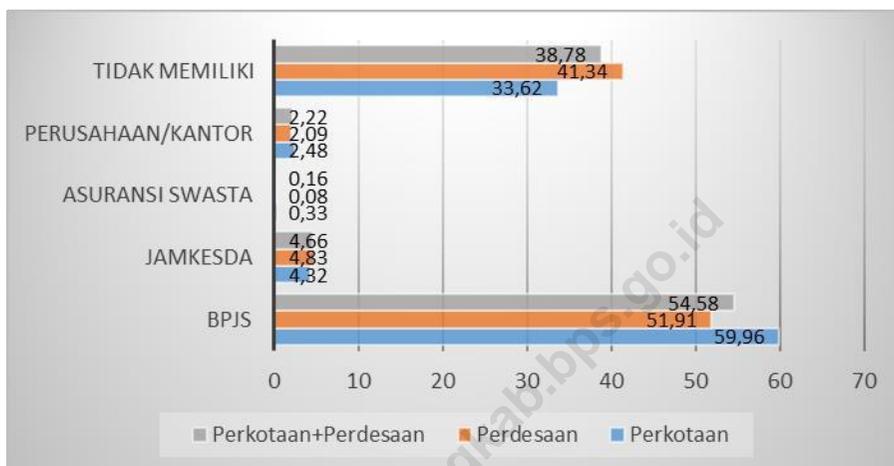


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2018 (%)

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS per Januari 2014, pada dasarnya diharapkan mampu membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Di sisi lain, Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan

kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya seringkali memberikan stigma bahwa berobat itu mahal, walaupun beberapa biaya pengobatan sudah dicukupi oleh BPJS.



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018

Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang sudah memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 38,78 persen. Jaminan kesehatan ini baik berupa BPJS, Jamkesda, asuransi swasta maupun jaminan dari perusahaan/kantor.

Bila diamati menurut fasilitas kesehatan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Magelang lebih memilih tempat praktik dokter/bidan daripada fasilitas kesehatan yang lain sebagai tempat berobat jalan. Hal ini terlihat dari capaiannya yang sebesar 40,82 persen tahun 2018, 45,01 persen tahun 2017, dan 51,53 persen tahun 2016. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah perkotaan akan tetapi juga di daerah perdesaan. Alasan dipilihnya fasilitas ini sebagai tempat berobat jalan adalah karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan berobat jalan di rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat 589 dokter dan bidan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Magelang.

Puskesmas menjadi pilihan kedua tempat berobat penduduk Kabupaten Magelang setelah praktik dokter/bidan. Tahun 2016 – 2018, baik penduduk perkotaan maupun perdesaan

menjadikan Puskesmas sebagai sarana berobat setelah Pratik dokter/bidan. Puskesmas terdapat di seluruh kecamatan dengan fasilitas yang lebih lengkap dan keberadaannya terjangkau oleh seluruh penduduk. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat 29 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Ada 8 kecamatan dengan 2 puskesmas, yaitu Salaman, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Mertoyudan, Kajoran, Secang, dan Grabag.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2016-2018

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RS Pemerintah	14,37	17,45	13,60	8,53	11,63	12,79	10,17	13,68	13,10
RS Swasta	8,67	2,74	7,91	1,04	2,42	3,16	3,18	2,53	4,95
Praktik Dokter/Bidan	40,61	44,79	41,49	55,80	45,13	40,42	51,53	45,01	40,82
Klinik/Praktik Dokter Bersama	7,60	4,63	15,26	6,82	10,74	8,68	7,04	8,59	11,15
Puskesmas/Pustu	28,93	28,22	23,49	28,26	27,40	29,91	28,45	27,69	27,50
UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)	0,00	2,74	0,31	0,00	5,23	4,25	0,00	4,36	2,76
Praktik Tradisional/Alternatif	3,94	3,74	2,53	2,69	2,81	5,40	3,04	3,14	4,32
Lainnya	1,59	0,66	0,00	0,48	0,00	0,48	0,79	0,23	0,36

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018

Rumah sakit pemerintah menjadi pilihan ketiga terbesar penduduk Kabupaten Magelang untuk berobat jalan. Ini terjadi pada penduduk perkotaan maupun perdesaan. Selama tahun 2016-2018, persentase penduduk perkotaan yang berobat di rumah sakit pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Jangkauan penduduk perkotaan untuk mengakses rumah sakit pemerintah lebih mudah dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Selain Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat di Kabupaten Magelang, penduduk Kabupaten Magelang juga memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Pemerintah yang berada di luar Kabupaten Magelang, terutama pada penduduk yang tinggal di perbatasan Kabupaten dan Kota Magelang. Di Kabupaten Magelang sendiri baru terdapat satu rumah sakit pemerintah yang berada di Kecamatan Muntilan.

Fenomena yang cukup menarik adalah semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan pengobatan tradisional/alternatif selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini tentu tak lepas dari maraknya pengobatan herbal yang semakin banyak dijumpai di masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam termasuk dalam menyembuhkan penyakit, turut mendorong meningkatnya pengobatan tradisional di Kabupaten Magelang.

<https://magelangkab.bps.go.id>



BAB 3 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Berdasarkan hal itu pula maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”, termasuk segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Angka Melek Huruf, Tingkat Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

3.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya. Dengan kemampuan dan kecakapan tersebut memungkinkan untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selain itu, angka melek huruf merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca dan tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2016-2018 (%)

Selama kurun waktu 2016-2018, perkembangan angka melek huruf untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang, secara umum mengalami peningkatan 0,4 poin menjadi 95,03 persen dari tahun 2018. Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang tahun 2017, secara rinci ditunjukkan pada Tabel 3.1. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Magelang, proporsi angka melek huruf penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Angka melek huruf penduduk laki-laki 15 tahun ke atas adalah 97,69 persen, sedangkan perempuan 92,37 persen.

Kendati angka melek huruf penduduk perempuan berusia 15-24 tahun mencapai 100 persen, namun rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas tersebut lebih dipengaruhi oleh rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan di kelompok umur 45 tahun ke atas, yang hanya 80.82 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk laki-laki. Angka melek huruf laki-laki pada kelompok umur 45 tahun ke atas juga paling rendah di antara kelompok umur yang lain, yaitu 93,39 persen.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15 Tahun ke Atas	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	97,93	99,53	100,00	95,36
Perempuan	93,53	100,00	99,44	85,63
Laki-laki+Perempuan	95,72	99,75	99,72	90,34
Perdesaan				
Laki-laki	97,57	100,00	100,00	94,29
Perempuan	91,80	99,52	99,17	82,65
Laki-laki+Perempuan	94,68	99,77	99,58	88,29
Perkotaan+Perdesaan				
Laki-laki	97,69	99,84	100,00	94,64
Perempuan	92,37	99,68	100,00	83,64
Laki-laki+Perempuan	95,03	99,77	100,00	88,97

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Jika dibandingkan antardaerah tempat tinggal, secara umum angka melek huruf di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada daerah pedesaan, untuk semua kelompok umur. Terlihat pada Tabel 3.1, sebanyak 95,72 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah melek huruf, sedangkan di daerah pedesaan hanya sebesar 94,68 persen.

Sementara itu, untuk penduduk berusia 45 tahun ke atas, selisih AMH cenderung tinggi, terpaut 2,05 poin. AMH penduduk berusia 45 tahun ke atas di daerah perkotaan adalah 90,34 persen sedangkan di daerah pedesaan 88,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang buta huruf di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

3.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal

Rata-rata lama sekolah = Tahun Konversi + (Kelas Tertinggi yang Pernah diduduki – Tahun Konversi Pendidikan yang ditamatkan :

SD = 6 tahun;

SMP = 9 tahun;

SMA = 12 tahun;

D1 = 13 tahun;

D2 = 14 tahun;

D3 = 15 tahun;

D4/S1 = 16 tahun S2 = 18 tahun;

S3 = 21 tahun.

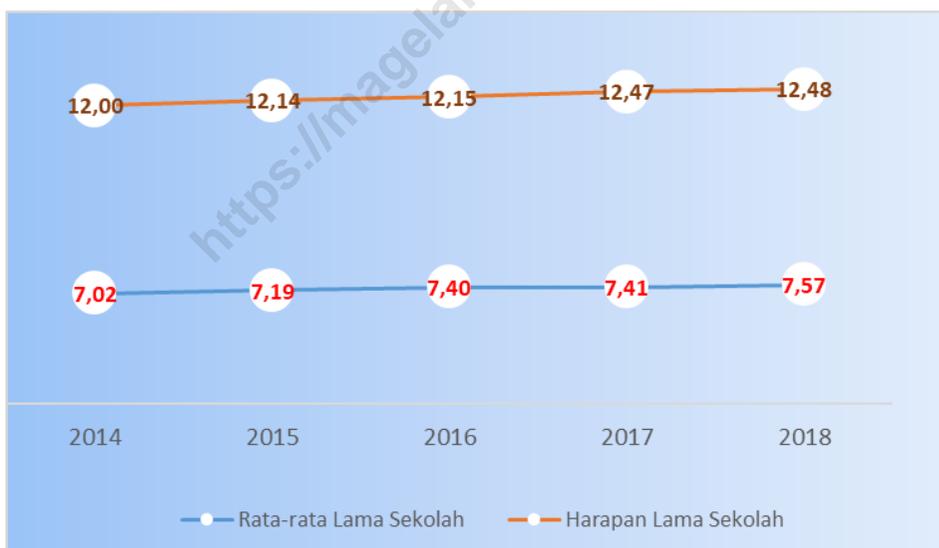
(tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah, yang dicapai oleh penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sekolah merupakan hal terpenting dalam pembangunan manusia. Sudah semestinya di era revolusi industri 4.0 ini manusia dibekali oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni. Zaman akan terus berubah dan perkembangan teknologi akan terus berkembang. Seseorang yang tidak bisa bertahan dengan arus kemajuan teknologi yang pesat perlahan-lahan akan tergerus oleh kemajuan zaman. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang penting bagi manusia.



Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka 2018

Gambar 3.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2014-2018

Pada kurun waktu 2014 hingga 2018, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,48 poin, menjadi 12,48 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah

mencapai 12,48, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sejalan dengan pencapaian angka Harapan Lama Sekolah, pertumbuhan positif juga dicapai oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,57 tahun pada 2018, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II. Hal ini bisa diharapkan sebagai modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik.

3.3 Tingkat Pendidikan

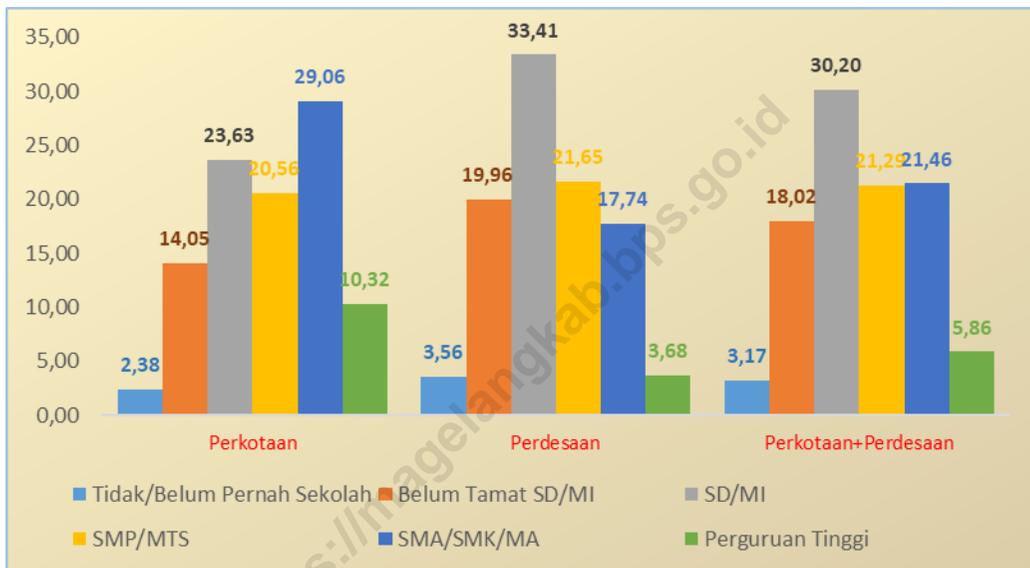
Kualitas sumber daya manusia dapat juga dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2016-2018 (%)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,10	3,94	2,38	3,30	6,13	3,56	3,24	5,47	3,17
Belum Tamat SD/MI	8,30	11,79	14,05	18,33	16,20	19,96	15,45	14,86	18,02
SD/ sederajat	34,85	27,67	23,63	42,34	40,10	33,41	40,19	36,32	30,20
SMP/ sederajat	9,99	22,15	20,56	13,53	20,72	21,65	12,51	21,16	21,29
SMA/ sederajat	32,42	26,35	29,06	18,61	13,44	17,74	22,57	17,37	21,46
Perguruan Tinggi	11,36	8,10	10,32	3,90	3,40	3,68	6,04	4,83	5,86

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Tabel 3.2 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, penduduk berumur lebih dari 15 tahun, yang hanya mengenyam pendidikan SD semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar.



Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2018 (%)

Tahun 2018, struktur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berbeda antara perdesaan dan perkotaan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk perkotaan berusia 15 tahun ke atas adalah SMA/SMK/MA (29,06%), sedangkan untuk penduduk perdesaan berusia 15 tahun yang paling banyak ditamatkan adalah SD/MI (33,41%). Untuk daerah perkotaan, pendidikan tertinggi kedua adalah SD/MI (23,63%), disusul oleh SMP/MTS (20,56%), belum tamat SD/MI (14,05%), Perguruan Tinggi (10,32%), dan terakhir tidak/belum pernah sekolah (2,38). Untuk daerah perdesaan, pendidikan tertinggi kedua adalah SMP/MTS (21,65%), disusul oleh belum tamat SD (19,96%), SMA/SMK/MA (17,74%), Perguruan Tinggi (3,68%), dan terakhir tidak/belum pernah sekolah (3,56).

Faktor geografis daerah perdesaan yang membuat jarak tempuh rumah ke sekolah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan di daerah perdesaan. Selain itu faktor pribadi

yang menganggap bahwa dengan sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan yang baik dan masih menganggap dengan bersekolah hanya membuang- buang waktu dan biaya. Hal ini menyebabkan kendala untuk tidak bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang lebih tinggi kadang- kadang juga tidak dianggap penting untuk kelangsungan masa depannya (Hafif Hasanah, 2014).

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pdck yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS)

dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menjadi indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

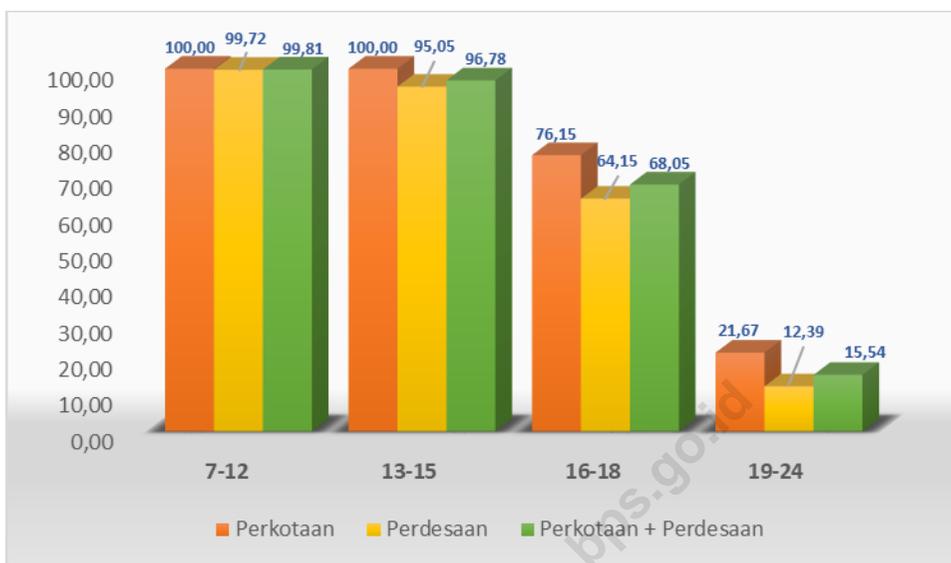
$$\text{APM SD/MI} = \frac{\text{Jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan:

Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SMA/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Pemerintah berharap agar kedua

indikator, APS dan APM, selalu meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu sebagai indikator yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.



Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan data Susenas 2018, secara umum, APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi. Sebanyak 99,81 persen penduduk berumur 7-12 tahun di Kabupaten Magelang bersekolah. Penduduk perkotaan umur 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 100,00 persen. Untuk umur yang sama di perdesaan bersekolah sebanyak 99,72 persen. Selain umur 7-12 tahun, APS perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan APS perdesaan. Ini menunjukkan kesadaran penduduk perkotaan untuk sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Untuk umur 13-15 tahun, APS penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan APS penduduk perdesaan. Sebanyak 96,76 persen penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Magelang bersekolah, 100,00 persen di perkotaan dan 95,05 persen di perdesaan. Untuk umur 16-18 tahun, sebanyak 68,05 persen penduduk bersekolah, 76,15 persen ada di daerah perkotaan dan 64,15 persen ada di perdesaan. Untuk umur 19-24 tahun, APS penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan APS penduduk perdesaan. Sebanyak 15,54 persen penduduk Kabupaten Magelang umur 19-24 bersekolah, 21,67 persen ada di daerah perkotaan dan 12,34 persen ada di daerah perdesaan.

Tabel 3.3 APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2015-2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7-12	Laki-laki	91,48	100,00	100,00	98,89	98,47	99,40	96,88	98,97	99,60
	Perempuan	100,00	96,27	100,00	99,33	100,00	100,00	99,56	98,90	100,00
	Laki-laki+Perempuan	96,09	98,29	100,00	99,09	99,22	99,72	98,18	98,94	99,81
13-15	Laki-laki	96,24	97,63	100,00	96,30	96,36	100,00	96,28	96,61	100,00
	Perempuan	96,52	98,73	100,00	94,44	95,25	89,65	94,96	96,26	93,32
	Laki-laki+Perempuan	96,38	98,24	100,00	95,37	95,88	95,05	95,65	96,45	96,78
16-18	Laki-laki	77,25	96,56	92,83	65,26	60,14	57,39	68,44	72,39	68,96
	Perempuan	79,98	65,17	57,73	60,01	69,69	71,48	65,93	68,21	67,05
	Laki-laki+Perempuan	78,63	81,51	76,15	62,80	64,82	64,15	67,24	70,36	68,05
19-24	Laki-laki	12,23	20,82	21,55	9,83	15,77	12,29	10,49	17,50	15,37
	Perempuan	31,73	32,57	21,81	15,02	9,26	12,52	18,80	16,48	15,73
	Laki-laki+Perempuan	21,21	25,97	21,67	12,54	12,68	12,39	14,70	17,03	15,54

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Dilihat dari 3 tahun terakhir, kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun memiliki APS yang tinggi yaitu lebih dari 90 persen. Program wajib belajar pemerintah direspon positif oleh masyarakat. Untuk APS penduduk umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi semakin meningkat.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

Dari sisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang terdapat 917 sekolah setingkat SD, 198 sekolah setingkat SMP, dan 101 sekolah setingkat SMA yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.4 APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2015-2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD/MI/Paket A	Laki-laki	88,80	100,00	100,00	97,85	98,47	96,88	95,40	98,97	97,93
	Perempuan	100,00	94,80	99,48	95,01	99,45	99,81	96,71	89,09	99,71
	Laki-laki + Perempuan	94,85	97,62	99,74	96,55	98,95	98,44	96,03	98,54	98,86
SMP/MTs/Paket B	Laki-laki	67,07	77,54	83,53	75,50	72,08	73,91	72,84	73,16	77,33
	Perempuan	77,51	90,40	93,88	77,94	81,82	65,72	77,83	84,31	75,43
	Laki-laki + Perempuan	71,44	84,68	88,37	76,72	76,26	70,00	75,22	78,28	76,42
SMA/SMK/Paket C	Laki-laki	68,12	83,75	61,92	46,56	44,93	52,29	52,28	57,99	52,52
	Perempuan	74,43	57,25	53,99	48,60	58,13	62,52	56,26	57,84	58,52
	Laki-laki + Perempuan	71,32	71,04	58,15	47,52	51,39	54,07	54,19	57,92	55,39
Perguruan Tinggi	Laki-laki	6,98	10,06	15,13	6,96	8,77	12,29	6,97	9,21	13,23
	Perempuan	22,80	20,39	17,68	11,39	8,40	12,44	13,97	12,12	14,31
	Laki-laki + Perempuan	14,26	14,59	16,33	9,27	8,59	12,39	10,52	10,56	13,73

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018

Selain dari APS (Angka Partisipasi Sekolah), tingkat partisipasi sekolah diukur juga dengan APM (Angka Partisipasi Murni). APM ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka APM ini memiliki pola yang hampir sama dengan angka APS. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APM untuk jenjang pendidikan SD tahun 2018 mencapai 98,54 persen, naik 0,32 poin dari tahun 2017. Hal ini berarti bahwa terdapat 98,54 persen penduduk Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. Meskipun sudah ditetapkan peraturan terkait batas usia masuk SD/ sederajat, namun beberapa orang tua murid terkesan mengharapkan putra/putri mereka yang berusia kurang dari 7 tahun untuk dapat bersekolah di SD/ sederajat, dengan alasan sudah mahir baca tulis. Alhasil, anak usia 6 tahun pun bisa bersekolah di SD/ sederajat, dengan syarat tertentu. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan rendahnya APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang pada 2018. Kendati demikian, jika disandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, yaitu target 94,8 persen APM SD/ sederajat pada 2019, maka capaian APM untuk Kabupaten Magelang sebesar 98,86 persen tersebut sudah terpenuhi.

APM Kabupaten Magelang 2018 untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3) naik sebesar 3,73 poin. Sedangkan untuk APM SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat turun. Ketika penduduk sebelum usia 7 tahun sudah masuk SD, menyebabkan usia sebelum 13 tahun sudah masuk SMP/ sederajat dan usia sebelum 16 tahun sudah masuk SMA/ sederajat. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan menurunnya APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang pada 2018.

Menariknya, bila diamati berdasarkan jenis kelamin, APM penduduk perempuan dan penduduk laki-laki cenderung mirip di setiap jenjang pendidikan, dari SD/ sederajat hingga perguruan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa disparitas gender dalam bidang pendidikan mulai berkurang. Jika diamati lebih jauh, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APM akan semakin mengerucut. Tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anggota rumah tangga. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya akan semakin mahal. Hal ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pembangunan pendidikan yang sudah dirancang maupun yang sebagian sudah dilaksanakan, demi mengejar ketertinggalan.

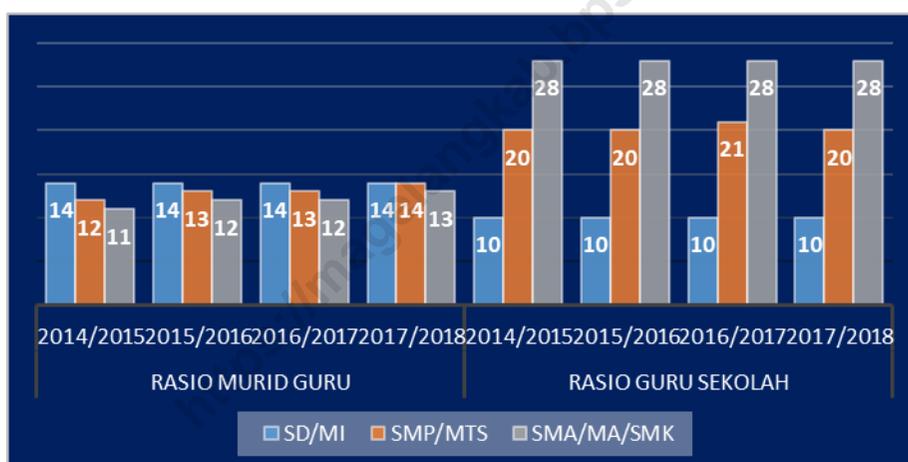
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas. Namun, karena ketersediaan data, dalam bab ini hanya dibahas mengenai rasio murid guru dan rasio guru sekolah.

Rasio murid guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang

dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Selama 4 tahun terakhir, rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK relatif stabil dengan tren yang cenderung meningkat. Pada 2018, rasio SD/MI adalah 14, artinya setiap 1 orang guru mengampu 14 murid SD/MI. Kenaikan rasio murid guru dua tahun terakhir lebih disebabkan meningkatnya jumlah murid. Peningkatan rasio murid guru dikhawatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena beban guru bertambah.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2014/2015-2018/2019

Tidak jauh berbeda dengan rasio murid guru, rasio guru sekolah juga relatif stabil, meskipun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio nya mengalami penurunan, yang semula 21 pada 2016 menjadi 20 pada 2018. Dengan rasio guru sekolah yang terstandar, harapannya, proses belajar-mengajar akan semakin efektif di tiap sekolah.

3.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan

rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2016-2018

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) Kabupaten Magelang tahun 2018 penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 7,57 tahun. Artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Magelang mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII).

BAB 4 KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi, serta pekerja anak.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Konsep ketenagakerjaan yang diusung BPS adalah *The Labor Force Concept*, merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO). Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan (atau sering disebut sebagai pengangguran terbuka). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, dan jumlah jam kerja akan dibahas dalam bab ini.

4.1 Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018

Keterangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Angkatan Kerja	212.488	487.419	699.907
Bekerja	203.747	475.759	679.506
Pernah Bekerja	4.034	7.144	11.178
Tidak Pernah Bekerja	4.707	4.516	9.223
Bukan Angkatan Kerja	106.365	175.691	282.056
Sekolah	26.567	51.755	78.322
Mengurus Rumah Tangga	66.316	96.817	163.133
Lainnya	13.482	27.119	40.601
Penduduk 15 Tahun Ke Atas	318.853	663.110	981.963
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	95,89	97,61	97,09
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,11	2,39	2,91
Persentase Angkatan Kerja Terhadap Usia Kerja	66,64	73,50	71,28

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2018

Selama tahun 2018, penduduk Kabupaten Magelang berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan. Sebanyak 73,50 persen penduduk

usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan bekerja, sementara di daerah perkotaan hanya sebesar 66,64 persen. Sementara untuk persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang bersekolah. Sebanyak 8,33 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan yang bersekolah, sementara di daerah perdesaan sebesar 7,80 persen.

4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPAK Kabupaten Magelang selama 4 tahun terakhir menunjukkan capaian yang tidak stabil. Pada 2013, TPAK Kabupaten Magelang sebesar 70,35 persen. Kemudian pada 2014, TPAK Kabupaten Magelang meningkat 1,41 poin menjadi 71,76 persen. Berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, pada 2015, TPAK Kabupaten Magelang justru menunjukkan penurunan sangat signifikan, menjadi 69,63 persen.

Tahun 2018, TPAK Kabupaten Magelang mencapai 71,28 persen. Turun 3,21 poin dari tahun 2017. Meskipun tidak menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah secara utuh, namun penurunan TPAK ini sesungguhnya menunjukkan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tidak jauh berbeda dengan TPAK, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terlihat fluktuatif. Sejalan dengan TPAK yang menurun, TPT tahun 2018 naik 0,47 poin dibanding tahun 2017. Meski TPT naik, akan tetapi besarnya pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang masih terkendali. Pengendalian angka pengangguran diharapkan mampu memberi peluang yang lebih besar dalam rangka mengentaskan kemiskinan.



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.1 Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2013-2018

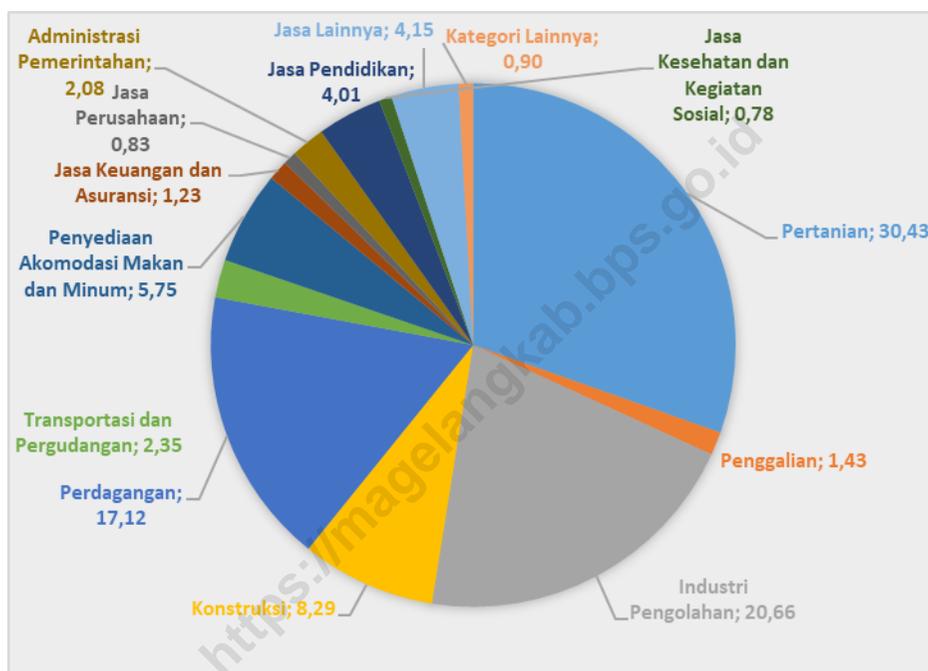
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada subbab ini dikelompokkan menjadi 14 sektor lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan)
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Konstruksi
5. Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor)
6. Transportasi dan Pergudangan
7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Jasa Keuangan dan Asuransi
9. Jasa Perusahaan
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
11. Jasa Pendidikan
12. Jasa Kesehatan
13. Jasa lainnya
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang)

Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih menjadi mata pencaharian terbesar penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu tahun 2018 yaitu sebesar 30,43 persen. Industri pengolahan merupakan sektor penyerap lapangan usaha terbesar kedua setelah pertanian di Kabupaten Magelang pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 20,66 persen. Perdagangan yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor menjadi penyerap lapangan usaha terbesar ketiga di Kabupaten Magelang pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 17,12 persen. Meski di Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten penghasil pasir, akan tetapi penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu masih sangat sedikit, hanya sebesar 1,43 persen. Pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Magelang juga belum banyak menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha penyediaan akomodasi

makan dan minum baru berkisar 5,75 persen. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Magelang, mengingat di Kabupaten Magelang terdapat salah satu warisan budaya dunia yaitu Candi Borobudur dan berbagai macam sektor pariwisata yang telah dikembangkan. Penyerapan tenaga kerja yang maksimal akan meningkatkan penghasilan dan menurunkan angka kemiskinan serta masalah-masalah pembangunan yang lainnya.



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2018

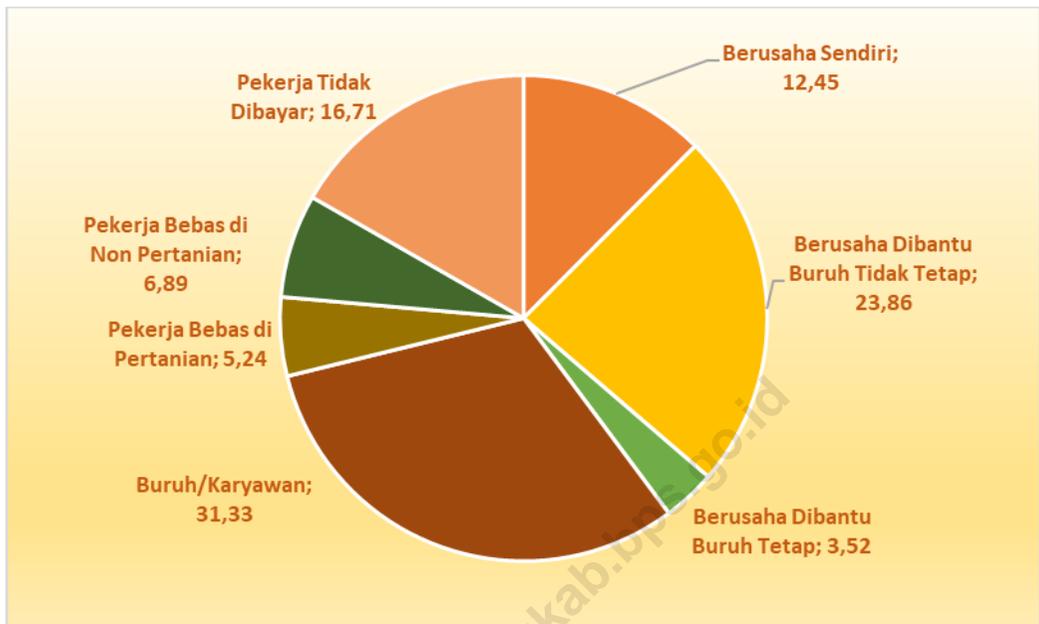
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2018

Apabila dilihat berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, perdagangan (perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di perkotaan, sedangkan pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di perkotaan. Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dirinci pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2018

Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	19.254	187.515	206.769
Penggalian	2.423	7.324	9.747
Industri Pengolahan	39.474	100.880	140.354
Konstruksi	13.754	42.553	56.307
Perdagangan	44.591	71.734	116.325
Transportasi dan Pergudangan	7.360	8.581	15.941
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	25.602	13.503	39.105
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.955	2.409	8.364
Jasa Perusahaan	3.536	2.123	5.659
Administrasi Pemerintahan	7.065	7.078	14.143
Jasa Pendidikan	19.312	7.914	27.226
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.255	3.031	5.286
Jasa Lainnya	10.107	18.085	28.192
Kategori Lainnya	3.059	3.029	6.088
Jumlah	203.747	475.759	679.506

Menurut status pekerjaan utama, persentase terbesar penduduk Kabupaten Magelang yang bekerja selama 2018 adalah sebagai buruh/karyawan, dengan capaian sebesar 31,33 persen. Selanjutnya, persentase terbesar kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, 23,86 persen, sedangkan status berusaha dibantu buruh tetap berada pada proporsi terendah, yaitu 3,52 persen. Sementara itu, proporsi penduduk dengan status pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar mencapai 28,84 persen.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2018

BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Salah satu teori ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pengeluaran konsumsi dan tingkat kesejahteraan adalah teori yang dinyatakan oleh Ernest Engel pada tahun 1857 (Wuryandari, 2011). Hasil studi empiris Engel adalah (1) kategori/proporsi terbesar dari anggaran keluarga adalah makanan, (2) proporsi pengeluaran total untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, (3) proporsi pengeluaran total untuk pakaian dan perumahan diperkirakan konstan, sementara proporsi pengeluaran untuk barang-barang mewah bertambah ketika pendapatan mulai meningkat. Dari ketiga hasil studi empiris Engel tersebut, temuan kedua adalah temuan yang lazim berlaku hingga saat ini.

Selanjutnya, perkembangan tingkat kesejahteraan dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan, makin tinggi tingkat kesejahteraan. Ernest Engel dalam Salvatore (2006), mengemukakan bahwa apabila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengeluaran rumah tangga sebagai rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga.

Data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas makanan dan nonmakanan (bukan makanan) disajikan dalam Tabel 5.1. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa selama 2016-2018 persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan lebih tinggi daripada komoditas makanan, dengan persentase yang terus meningkat. Persentase

pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas makanan pada 2018 adalah sebesar 49,30 persen, menurun 0,25 poin jika dibandingkan 2017, yang mencapai 49,55 persen. Berbanding terbalik dengan komoditas makanan, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan tahun 2018 sebesar 50,70 persen justru semakin meningkat 0,25 poin dibanding tahun 2017 yang mencapai 50,45 persen.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2016-2018

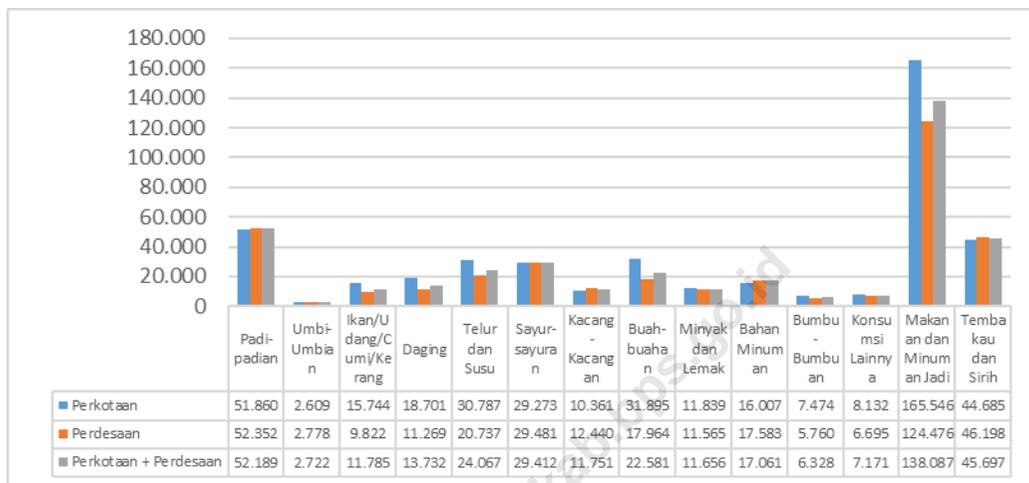
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan						
Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	294.828	323.814	394.238	47,62	49,55	49,30
Bukan Makanan	324.298	329.724	405.415	52,38	50,45	50,70
Perumahan	145.427	144.893	168.943	23,49	22,17	21,13
Barang dan Jasa	93.085	84.439	106.899	15,03	12,92	13,37
Pakaian	20.036	17.901	26.864	3,24	2,74	3,36
Barang Tahan Lama	46.774	46.980	58.338	7,55	7,19	7,30
Lainnya	18.976	35.511	44.371	3,06	5,43	5,55
Total Pengeluaran	619.126	653.538	799.653	100	100	100

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2018

Tren persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat. Secara deskriptif, hasil ini turut mendukung hasil studi empiris yang dikemukakan oleh Engel bahwa proporsi pengeluaran total untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Secara nominal, total pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebesar 799.653 rupiah per kapita per bulan. Naik sebesar 146.115 rupiah dibanding tahun 2017. Pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 323.814 rupiah per kapita

per bulan, naik 28.286 rupiah dibanding tahun 2017. Sedangkan untuk non makanan sebesar 329.724 rupiah per kapita per bulan, naik 4.426 rupiah dibanding tahun 2017.



Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2018

Rata-rata pengeluaran makanan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Magelang menurut komoditas antara daerah perkotaan dan perdesaan memiliki tren yang sama. Pengeluaran terbesar digunakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Konsumsi makanan jadi di daerah perkotaan sebesar 37,21 persen dan daerah perdesaan sebesar 33,72 persen dari seluruh total pengeluaran makanan. Tren wisata kuliner secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Magelang.

Pengeluaran terbesar selanjutnya adalah untuk komoditas padi-padian. Meski beras merupakan makanan pokok di Kabupaten Magelang, akan tetapi komoditas padi-padian 11,66 persen untuk daerah perkotaan dan 14,18 persen untuk daerah perdesaan dari total pengeluaran per kapita per bulan. Komoditas tembakau dan sirih merupakan pengeluaran terbesar ketiga penduduk baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk merokok memiliki porsi besar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pengeluaran untuk komoditas tembakau dan sirih memakan porsi 10,04 persen dari total pengeluaran makanan untuk daerah perkotaan, dan 12,52 persen dari total pengeluaran makanan untuk daerah perdesaan.

5.2 Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein

Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya (Samuelson & Nordhaus, 1996). Oleh karena itu konsumsi dalam istilah sehari-hari seringkali diartikan sebagai pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman.

BPS membedakan konsumsi rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu: konsumsi makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 52 jenis komoditas, yaitu: padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Kemudian untuk konsumsi bukan makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan (BPS, 2015), seperti kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, dan lain-lain. Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Tingkat kecukupan gizi, yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per kapita Perhari di Kabupaten Magelang, 2016-2018

Konsumsi	Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Energi (kkal)	2016	1.855,83	1.770,57	1.795,40
	2017	1.826,62	1.812,06	1.816,56
	2018	2.044,62	1.953,99	1.984,02
Protein (gram)	2016	51,20	46,49	47,86
	2017	51,95	47,55	48,91
	2018	57,64	52,51	54,21

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2018

Tabel 5.2 menyajikan rata-rata konsumsi energi dan protein per kapita perhari. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi energi dari penduduk di Kabupaten Magelang pada 2018 mengalami kenaikan 9,22 persen, menjadi 1.984,02 kilo kalori per kapita perhari. Sejalan dengan konsumsi energi, rata-rata konsumsi protein di Kabupaten Magelang juga mengalami kenaikan, sebesar 10,83 persen menjadi 54,21 gram per kapita perhari.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, selama kurun waktu 2016-2018, terlihat bahwa konsumsi energi dan protein di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Konsumsi energi di daerah perkotaan tahun 2018 mencapai 2.044,62 kilo kalori, sedangkan di perdesaan 1.953,99 kilo kalori per kapita perhari.

Seperti halnya konsumsi energi, rata-rata konsumsi protein di daerah perkotaan juga lebih besar daripada perdesaan. Berdasarkan hasil olah data Susenas, didapatkan konsumsi protein untuk daerah perkotaan pada 2018 mencapai 57,64 gram, sedangkan untuk daerah perdesaan hanya sebesar 52,51 gram per kapita perhari. Meskipun rata-rata konsumsi energi dan protein secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017, namun pencapaian tersebut masih di bawah angka kecukupan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, yaitu 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein.

BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan menurut Kepmen (1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah seringkali menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat

menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Salah satu arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang meliputi perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, dan sanitasi. Pencapaian sasaran kebijakan tersebut memerlukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program oleh berbagai sektor terkait, sehingga fokus kepada target yang sama.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya

6.1 Kondisi Fisik Tempat Tinggal



Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2016-2018

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas,

rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan Susenas 2018, di Kabupaten Magelang terdapat 90,70 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, sedangkan sisanya, sebesar 9,30 persen bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah namun bukan milik sendiri tersebut terdiri dari 1,83 persen kontrak/sewa, 7,25 persen bebas sewa, dan 0,22 persen lainnya.



Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

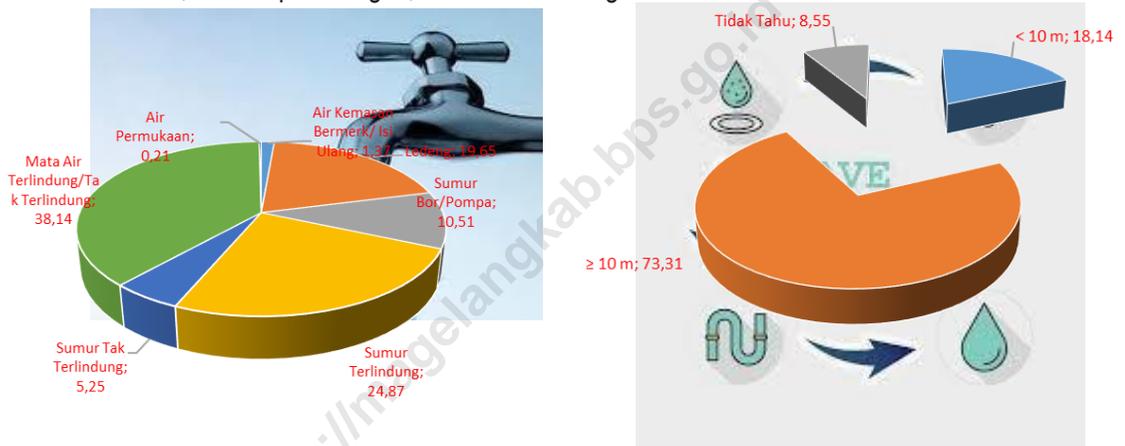
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan Susenas 2018, sebanyak 88,37 persen rumah tangga memiliki dinding terluas berupa tembok. Kayu/batang kayu merupakan dinding terluas kedua yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang, sedangkan dinding dengan bambu/anyaman bambu sebanyak 4,34 persen. Untuk bangunan atap, 96,43 persen rumah tangga sudah beratapkan genteng. Sisanya asbes, beton, dan seng. Tidak ada rumah tangga yang beratapkan daun/rumbia/ijuk. Keramik menjadi lantai terluas sebagian besar rumah tangga. Sebanyak 42,2 persen rumah tangga sudah berlantaikan keramik. Untuk semen/bata merah, dimiliki sebanyak 37,2 persen rumah tangga. Hanya 11,61 persen saja yang berlantaikan tanah.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Secara harfiah, rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian

hidup yang mencakup banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

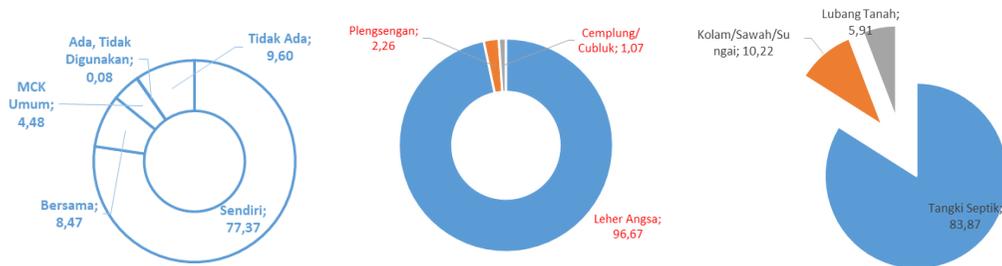


Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2018

Sumur dan mata air menjadi sumber air terbesar yang banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang. Pengguna sumur sebanyak 40,63 persen rumah tangga menggunakan sumur yang terdiri dari 5,25 persen sumur tak terlindung, 24,87 persen sumur terlindung, dan 10,51 persen sumur bor/pompa. Pengguna mata air sebanyak 38,14 persen dari rumah tangga. Sisanya air kemasan, ledeng, dan air permukaan. Sedangkan jarak penampungan kotoran/tinja ke sumber mata air sebagian besar rumah tangga sudah berjarak 73,31 persen.

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2018 membagi kriteria penggunaan kloset sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar.



Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2018

Tahun 2018 sebagian besar rumah tangga sudah memiliki MCK sendiri. Sebagian besar menggunakan kloset jenis leher angsa. Sebagian besar pembuangan akhir tinja sudah dilakukan di tangki septik. Hanya 10,22 persen yang pembuangan akhirnya menggunakan kolam/sawah/sungai, dan 5,91 persen menggunakan lubang tanah.

6.3 Kesehatan Lingkungan

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.



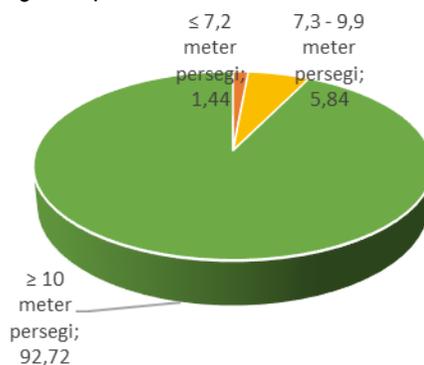
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2015-2018

Berdasarkan data Susenas, rumah tangga di Kabupaten Magelang sudah beratap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Tidak ada rumah tangga yang beratap bambu, sirap, kayu, jerami, daun, dan rumbia. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal penduduk Kabupaten Magelang sudah berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan lantai rumah bukan tanah untuk tahun 2018 sebesar 88,39 persen. Ini berarti hanya 11,61 persen rumah tangga yang memiliki lantai tanah. Dibandingkan tahun 2017, rumah tangga dengan lantai bukan tanah meningkat 4,71 poin. Demikian juga dengan kondisi dinding pada perumahan di Kabupaten Magelang. Dinding rumah terluas tembok dan kayu pada rumah tangga di Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebesar 95,66 persen, sisanya 4,34 persen dinding terluasnya berupa bambu, anyaman bambu, dan lainnya.

Selain kedua indikator sebelumnya, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap terluas. Dari hasil Susenas 2016 - 2018 diperoleh bahwa seluruh rumah tinggal di Kabupaten Magelang sudah memenuhi kriteria atap yang layak, yaitu atap terluasnya terbuat dari beton genteng, sirap, seng, ataupun asbes.

Masih ada indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perumahan, yaitu luas lantai per kapita. Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai rumah per kapita adalah rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.



Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018
 Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Magelang, 2018

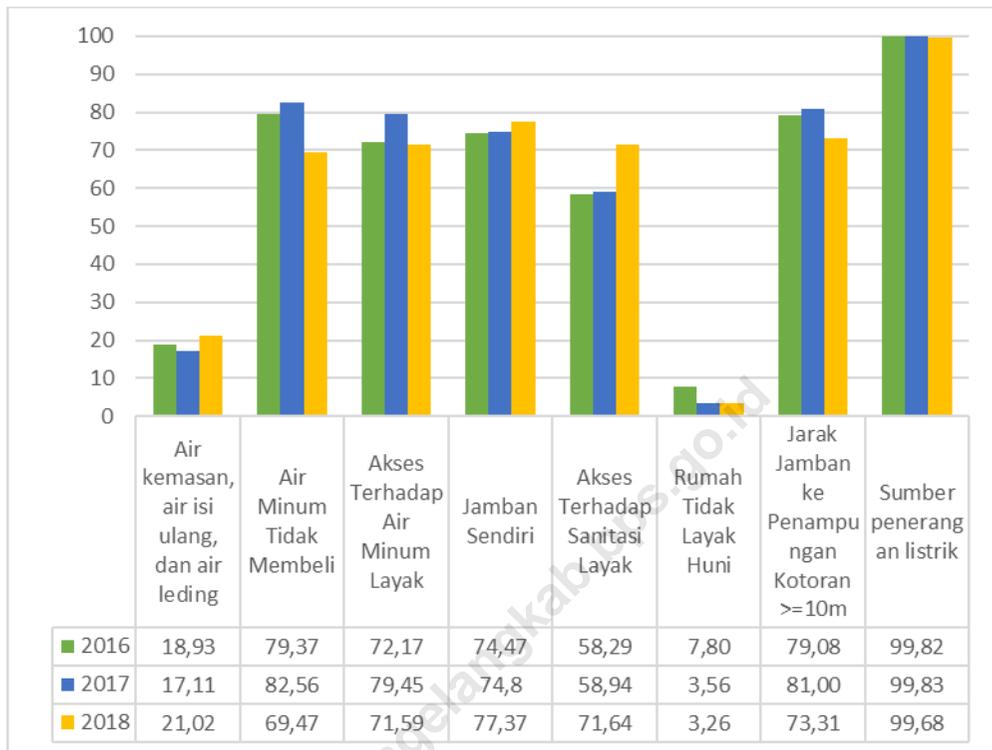
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 22 ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Organization* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada 2018, lebih dari 95 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 7,2 meter persegi atau lebih. Rumah tinggal dengan luas lantai per kapita 7,2 meter persegi atau lebih merupakan ukuran ideal yang disyaratkan menurut Undang-Undang. Sementara itu, berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh WHO dan APHA terdapat 92,72 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita 10 meter persegi atau lebih.

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal dapat ditentukan dari kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pada 2018, rumah tangga di Kabupaten Magelang yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mencapai 21,02 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari air minum yang dipakai oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang, sebanyak 69,47 persen di tahun 2018 tidak membeli.



Sumber: Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2016-2018

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai air minum yang terlindungi meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam, atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2015. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Magelang yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 71,59 persen tahun 2018, turun 7,86 poin dibanding tahun 2017.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya dalam menunjang kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Dari hasil Susenas 2018, sebanyak 73,31 persen rumah tangga dimana jarak jamban ke penampungan kotoran lebih dari 10 meter, turun 7,69 poin dibanding tahun 2017.

Berdasarkan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septi (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Sebanyak 71,64 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang memiliki sanitasi layak naik 12,7 poin dibanding tahun 2017.

Salah satu indikator dari TPB ke-11 adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4(empat) kriteria, meliputi: kecukupan luas tempa tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses terhadap air minum (*access to improved water*), memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*), dan memenuhi syarat ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan utama atap rumah terluas bukan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia/lainnya, bahan bangunan utama lantai terluas bukan berupa tanah atau lainnya, serta bahan bangunan utama dinding rumah terluas bukan berupa bambu atau lainnya. Indikator ini dapat digunakan untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, sebagai upaya pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar, atau rumah yang tidak layak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Persentase rumah tangga yang menepai rumah tidak layak huni menurun dari 7,80 persen tahun 2016 menjadi 3,26 persen tahun 2018.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Magelang mencapai 99,68 persen.

<https://magelangkab.bps.go.id>



BAB 7 KEMISKINAN

Secara umum, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang telah digunakan secara meluas di berbagai negara, di samping ukuran-ukuran lain seperti PDB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat emisi CO₂ (Nasution, 2015). Tingkat kemiskinan di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung melambat (Bank Dunia, 2015). Penurunan kemiskinan yang melambat ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia belum optimal.

Tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pola penggunaannya (Arifin dan Simatupang, 1988). Masyarakat berpendapatan rendah akan mengalokasikan pendapatannya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan bukan makanan. Sejalan dengan hal tersebut, Rambe (2008) menuturkan salah satu indikator kesejahteraan keluarga adalah dengan mengukur besarnya pengeluaran. Sementara itu, BPS mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan batas garis kemiskinan, didasarkan pada data konsumsi serta pengeluaran makanan dan bukan makanan.

Secara formal, dengan pendekatan *basic needs approach*, BPS (2015: 8) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yaitu sejumlah 2.100 kilo kalori per kapita perhari, dan kebutuhan dasar bukan makanan, berupa sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain. Kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam definisi tersebut merupakan standar yang diterjemahkan secara finansial dalam satuan moneter sebagai suatu

garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin jika pengeluarannya di bawah standar garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir terlihat fluktuatif namun cenderung menurun. Begitu pula dengan proporsi penduduk miskin di setiap tahunnya. Pada 2014 dan 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang hampir mencapai 13 persen. Selanjutnya, pada 2015 proporsi tersebut turun, hingga tahun 2018 penduduk miskin mencapai 11,23 persen.



Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka 2019

Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2014 -2018

Selama 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang mencapai lebih dari 143,44 ribu jiwa dengan proporsi 11,23 persen, sedangkan pada 2017 jumlah penduduk miskin mencapai

lebih dari 157,15 ribu jiwa dengan proporsi 12,42 persen. Kendati secara angka mengalami penurunan dibandingkan 2017, bahasan mengenai kemiskinan, tidak hanya berhenti pada berapa jumlah dan proporsinya, namun perlu diketahui juga garis kemiskinan, serta sejauhmana kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Secara formal, dengan pendekatan *basic needs approach*, BPS (2015: 8) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yaitu sejumlah 2.100 kilo kalori per kapita perhari, dan kebutuhan dasar bukan makanan, berupa sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain. Kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam definisi tersebut merupakan standar yang diterjemahkan secara finansial dalam satuan moneter sebagai suatu garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Seseorang akan dikatakan miskin jika pengeluarannya di bawah standar garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang terus meningkat. Sejak 2014-2018, garis kemiskinan di Kabupaten Magelang meningkat secara bertahap, dari Rp246.292,- per kapita perbulan pada 2014, menjadi Rp296.327,- per kapita perbulan pada 2018. Meningkatnya garis kemiskinan tersebut besar kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir, sangat fluktuatif. Pada 2014, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah 2,07 sedangkan saat 2015 indeks tersebut turun secara signifikan menjadi 1,60, dan tahun 2018 ini indeks kedalaman kemiskinan merupakan indeks terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 1,55. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Seiring dengan nilai P1, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan pola yang sama. Pada 2018, nilai indeks tersebut mengalami penurunan, menjadi 0,34 yang sebelumnya sebesar 0,31 pada tahun 2017. Naik 0,04 poin dari tahun 2017. Gambaran garis kemiskinan beserta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2014 hingga 2018 disajikan secara ringkas dalam Gambar 7.2.

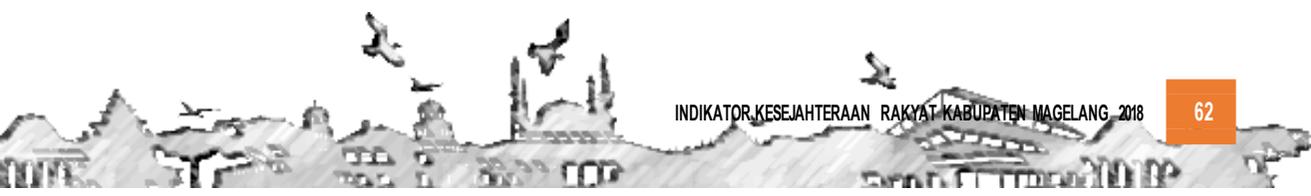


Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka 2019

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2014-2018

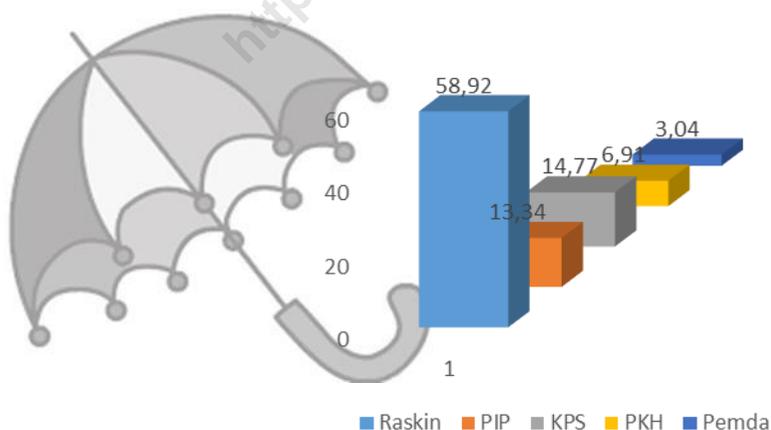
Meskipun diketahui bahwa pada 2018 jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang menurun dibandingkan 2017 diimbangi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang cenderung menurun menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan atau dengan kata lain, penduduk miskin semakin sejahtera. Begitu pula dengan kesenjangan pengeluaran yang masih ada. Meski demikian, dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.

<https://magelangkab.bps.go.id>



BAB 8 PERLINDUNGAN SOSIAL

Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Perlindungan sosial dianggap sebagai instrument perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia. Program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin antara lain Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2018

Dari hasil Susenas 2018, sebanyak 58,92 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang menerima raskin. Raskin bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga

terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Sebanyak 13,34 persen rumah tangga menerima program PIP. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peserta PIP ini mendapatkan bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara rumah tangga penerima KPS sebanyak 14,77 persen. Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin antara lain mendapatkan subsidi beras atau lebih dikenal dengan Beras raskin, mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 2013 Nomor 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Pengaduan Masyarakat.

Untuk rumah tangga penerima PKH tahun 2018 sebanyak 6,91 persen. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Untuk bantuan dari pemerintah daerah, banyaknya rumah tangga yang menerima bantuan sebesar 3,27 persen.

BAB 9 SOSIAL LAINNYA

Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif.

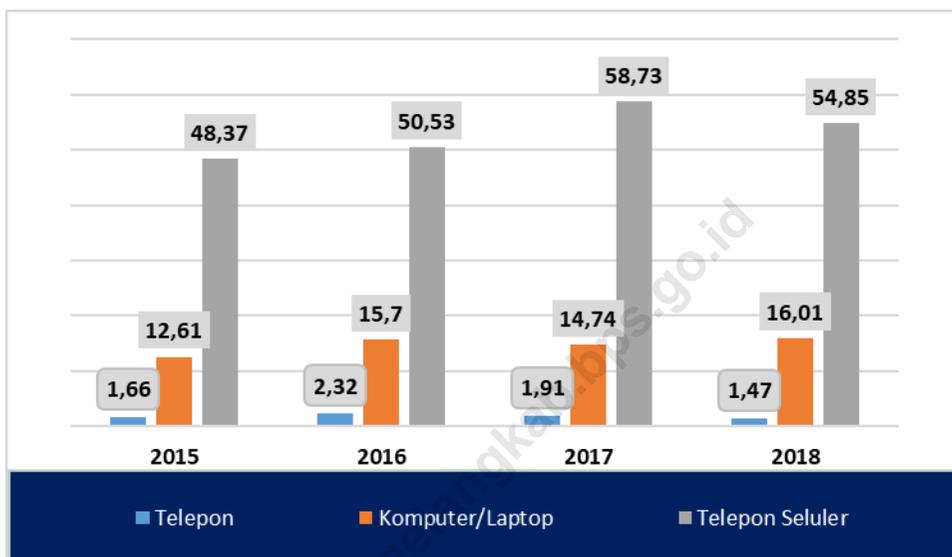
Tingkat kebutuhan pun mulai mengalami pergeseran, dari yang semula merupakan kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi adalah beberapa contoh kebutuhan yang kini mulai bergeser menjadi kebutuhan primer.

Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Penguasaan teknologi seolah menjadi suatu prestise tersendiri dan indikator kemajuan dari suatu daerah. Arus globalisasi antar wilayah yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

Berdasarkan Susenas 2018, terdapat 1,47 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon. Pengguna telepon dari tahun ke tahun semakin menurun, beralih ke penggunaan HP/telepon seluler. Dalam 4 tahun terakhir pengguna telepon menurun sebanyak 0,19 poin dari 1,66 persen ke 1,47 persen.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap telepon seluler juga mengalami peningkatan. Selama 4 tahun terakhir pengguna telepon seluler meningkat sebesar 6,48 poin, dari 48,37 persen pada tahun 2015 menjadi 54,85 persen pada tahun 2018. Persentase rumah tangga

dengan telepon seluler jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat telepon biasa. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses telepon seluler menggambarkan bahwa masyarakat cenderung memilih telepon seluler dibandingkan telepon biasa karena kemudahan mobilitas.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler, dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2014-2018

Seiring arus perkembangan informasi dan teknologi yang semakin deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal penggunaan komputer atau laptop. Selama 2018, terdapat 16,01 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang menggunakan komputer, baik berupa PC/Dekstop, laptop/notebook, maupun tablet. Meningkat 1,27 poin dibandingkan dengan tahun 2017. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin membutuhkan peralatan yang menunjang.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511,
Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,
E-Mail : bps3308@bps.go.id Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id>

ISBN 978-623-91219-6-9



9 786239 121969